



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 481, 2020

KEMENDAG. Sebagian Urusan Pemerintahan. Bidang Perdagangan. Gubernur. Wakil Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Tahun Anggaran 2020. Pelimpahan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian belanja Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan penyesuaian belanja Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1596) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
 PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	1.112.627.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	854.233.000
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	258.394.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	974.098.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	686.669.000
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	287.426.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
3	GOVERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	1.101.560.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	837.609.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	263.941.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
4	GOVERNUR RIAU	RIAU	900.099.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	639.597.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		5 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	260.502.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
5	GOVERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	864.281.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	643.429.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	220.852.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
6	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	868.588.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	631.997.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	236.591.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
7	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.034.776.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	797.834.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	236.942.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	907.038.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	649.868.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	257.170.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
9	GOVERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	1.001.312.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	719.400.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	281.912.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
10	GOVERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	840.898.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	629.449.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	211.449.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
11	GOVERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	593.625.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	354.818.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	238.807.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
12	GOVERNUR BANTEN	BANTEN	766.250.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	541.204.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	225.046.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
13	GOVERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	874.096.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	656.921.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	217.175.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
14	GOVERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	966.316.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	723.049.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		5 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	243.267.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	945.607.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	716.797.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	228.810.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	3.535.788.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	712.029.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	2.823.759.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
		3 FTA CENTER DAERAH	
17	GUBERNUR BALI	BALI	992.341.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	706.101.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	286.240.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	840.831.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	584.049.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		5 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	256.782.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	888.767.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	619.665.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	269.102.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
20	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	985.865.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	700.997.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	284.868.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
21	GOVERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	973.261.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	688.985.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	284.276.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
22	GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	819.992.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	570.105.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	249.887.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
23	GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	899.210.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	632.961.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	266.249.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
24	GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	945.875.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	700.069.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	245.806.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
25	GOVERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	907.199.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	589.025.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	318.174.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
26	GOVERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	950.351.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	653.753.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	296.598.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH [Rupiah]
27	GOVERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	934.799.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	644.225.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 PANGAN NUSA	
		4 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	290.574.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
28	GOVERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	962.563.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	673.659.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	288.904.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
29	GOVERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	1.006.813.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	708.257.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	298.556.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
30	GOVERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	1.012.389.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	725.877.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	286.512.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
31	GOVERNUR MALUKU	MALUKU	1.075.809.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	733.525.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	342.284.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
32	GOVERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1.038.683.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	725.757.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	312.926.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	1.127.942.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	752.001.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	375.941.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	1.073.585.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	744.533.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	329.052.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tdl.

AGUS SUPARMANTO